

## DEMOKRASI DAN SISTEM KEPARTAIAN “MENIMBANG PARTAI LOKAL di INDONESIA”

**Ahmad Muttaqin**

Peneliti Indikator Politik Indonesia

### **Abstrak**

*Otonomi daerah melalui kewenangan pemerintah daerah dalam UU 23 tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar untuk daerah dalam mengelola potensi yang ada di tempatnya. Hal ini kemudian berdampak keseluruhan aspek kehidupan, dan tidak terkecuali politik. Meskipun dalam lima urusan wajib pemerintah pusat dicantumkan urusan politik nasional adalah kewenangan pusat, namun dalam perjalanannya daerah memiliki fenomena tersendiri dalam hal tersebut, salah satunya adalah fenomena partai politik lokal, seperti di Aceh misalnya. Oleh karena itu makalah ini mencoba untuk menelisik fenomena munculnya partai lokal dalam sistem perpolitikan dan kepartaian di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Partai Politik, Aceh, Otonomi Daerah

### **A. Pendahuluan.**

Tiada kalimat yang banyak disebut kalau kita berbicara politik, selain Demokrasi. Demokrasi adalah kalimat yang kini telah banyak membawa kalangan ilmunan, aktifis dan bahkan pejabat harus menyebutnya; kalau tidak mau dibilang ketinggalan. Bahkan dalam studi-studi humaniora kata demokrasi menyimpan pesona serta keyakinan bulat diantara para pengikutnya. Ini dikarenakan demokrasi adalah sistem yang diadopsi oleh banyak negara-negara pasca pecahnya Perang Dunia II (PD II). Juga karena demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Reformasi 98’ yang mengantar proses demokratisasi

Indonesia disambut dengan berdirinya berbagai macam partai politik sebagai cermin kebebasan masyarakat. Partai politik sebagai salah satu prasyarat tegaknya demokrasi menjadi penting keberadaannya, karena melalui partai politiklah berbagai aspirasi masyarakat kemudian disalurkan. Paradoksnya parpol-parpol yang berdiri pasca reformasi yang diharapkan akan menjadi saluran efektif rakyat dalam menyuarakan kepentingannya, hanya menjadi batu loncatan untuk mobilisasi kekuasaan modal oleh para elit politik. Hasilnya, perpecahan parpol disana-sini, kebijakan yang tidak lagi mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Munculnya wacana partai lokal kiranya patut menjadi perhatian kita bersama untuk dibahas dan dikaji.

## **B. Pembahasan.**

Fukuyama dalam buku *The End of History and The Last Man* pernah mengungkapkan bahwa sejarah perkembangan ideologi-politik umat manusia telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal atas ideologi-ideologi lainnya. Demokrasi menurutnya merupakan tahap akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan bentuk final pemerintahan manusia, sehingga ia bisa disebut sebagai “akhir sejarah”.<sup>1</sup> Pendapat Fukuyama mungkin bisa dibenarkan, melihat demokrasi saat ini telah menjadi *Prototype* dari pola-pola pemerintahan modern di hampir semua Negara di belahan dunia ini.

Pasca runtuhnya tembok Berlin di Jerman, pecahnya negeri Uni Soviet serta tumbanganya beberapa rezim otoriter di Eropa, Asia maupun Amerika Latin, menandai era baru kebangkitan gelombang demokratisasi serta “tidak lakunya” ideologi fasisme dan komunisme yang menjadi trend abad 19 an. Demokrasi dipandang sebagai satu-satunya sistem terbaik saat ini setidaknya karena demokrasi merupakan penjelmaan pemerintahan sipil, adanya representasi (Lembaga politik) serta

---

<sup>1</sup> Francis Fukuyama. “*The End of History and The Last Man*”, Kemengian Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Alih bahasa: Amrullah (Jakarta; Qolam. 2004) cet.3 hlm 1

adanya kebebasan publik. Demokrasi mencakup pemerintahan sipil, paling kurang dalam dua pengertian. *Pertama*, setiap warga Negara memiliki hak untuk mencari dan memegang jabatan politik, mereka berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui aktifitas-aktivitas seperti pemungutan suara, terlibat dalam organisasi politik dan kelompok-kelompok kepentingan dan jabatan-jabatan politik terkait. *Kedua*, keputusan-keputusan politik harus dijustifikasi secara publik. Dalam hal demokrasi mencakup institusi-institusi representatif (lembaga-lembaga perwakilan), yaitu bahwa otoritas untuk memerintah berasal dari pemilihan oleh rakyat. Adapun demokrasi mencakup pemeliharaan kebebasan publik, dalam arti bahwa setiap warga Negara memiliki hak tertentu, seperti hak untuk berkomunikasi secara bebas, berkumpul dan berserikat, yang harus dihormati oleh Negara.<sup>2</sup>

Dengan kata lain demokrasi dalam hal ini merupakan sistem yang membuka lebar kran partisipasi politik publik. Partisipasi publik dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan atau kebijakan publik.<sup>3</sup> Salah satu saluran yang dapat ditempuh dalam rangka partisipasi masyarakat dan merupakan prasyarat bagi tegaknya sebuah demokrasi adalah partai politik.

### **Pengertian partai politik.**

Kata partai berasal dari kata “*part*” yang berarti bagian dan yang menunjuk kepada bagian dari paea warga suatu Negara, sedang kata partai-partai menunjuk kepada sekumpulan barang-barang atau segerombolan orang-orang, jadi kini menunjuk pada perkumpulan sejumlah warga-earga dari suatu Negara, yang mengagabungkan siri dalam suatu kesatuan, yang mempunyai tujuan tertentu. Sedang partai politik oleh Mac Iver dalam

---

<sup>2</sup> Rafael Raga Maran. “*Pengantar Sosiologi Politik*” (Jakarta; Rineka Cipta. 2001). Cet.1. hlm.108.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm, 147

bukunya *“The Modern State”* diberi devinisi sebagai; suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau policy, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau Undang-undang Dasar agar menjadi penentuan cara melakukan pemerintahan.<sup>4</sup> Miriam Budiarmo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, yang bertujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—biasanya dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>5</sup>

Partai politik di sebuah Negara demokratis memegang peran penting karena parpol memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) *Sarana komunikasi politik*, yaitu menyalurkan aneka raga pendapat dan aspirasi masyarakat (*interest aggregation*) untuk kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang terukur (*interest articulation*) untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk menjadi *public policy*.
- 2) *Sosialisasi dan partisipasi politik*, yaitu proses melalui mana seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
- 3) *Recrutmen politik*, dan;
- 4) *Pengatur konflik (conflik management)*.<sup>6</sup>

Namun patut disayangkan, banyak partai politik di Indonesia tidak menjalankan fungsi sebagai mana yang disebut di atas, partai justru menyuguhkan Konflik internal kepada masyarakat. Perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa antara Alwi Sihab-Saifullah Yusuf melawan seniornya Gus Dur-Muhaimin Iskandar atau perpecahan di PDIP antara kubu Megawati dengan kubu PDIP Pembaharu dibawah pimpinan Roy

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro. *“Asas-asas Ilmu Negara dan Politik”*. (Bandung; Eresco. 1981) cet.2 hlm.100

<sup>5</sup> Miriam Budiarmo. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*. (Jakarta;Gramedia. 2002) cet.22. hlm.160.

<sup>6</sup> *ibid.* hlm.163-164

BB Janis atau Pertikaian kubu Zainuddin MZ dengan Zainal Ma'arif di PBR atau juga Budi Santoso dan Vence Mawangkang di tubuh partai Demokrat serta Pemecatan 6 pengurus harian pusat PPP yang terlibat silaturahmi nasional guna mempercepat muktamar ke V partai tersebut, menjadi catatan penting.<sup>7</sup> Perpecahan partai politik jika dianalisa bersumber dari kentalnya sifat oportunistik politik ditengah krisis identitas dan ideologi. Ideologi dalam hal ini, bukan yang terdapat dalam AD/ART partai melainkan ideologi sebagai sistem nilai yang diintegrasikan pada kader-kader parpol. Identitas dan ideology yang seharusnya menjadi perekat parpol diganti dengan ikatan persamaan kepentingan politik individual atau kelompok ditubuh partai, maka ketika kepentingan mereka tidak terakomodir maka keretakan menjadi hal yang tak terelakkan.

Ketika keretakan muncul maka tidak ada lagi sandaran parpol untuk tetap memikat masa kecuali figur. Figur, menjadi magnet parpol dalam mempertahankan masanya, akibatnya parpol mengalami personalisasi yang ditandai oleh patronase. Praktek oligarki, konspirasi di tubuh parpol makin menguatkan terjadinya perubahan orientasi kepada kekuasaan, jabatan dan uang. Rangkap jabatan yang sampai saat ini masih tetap dipertontonkan oleh elit partai semakin memperkuat pemandangan di atas.

Munculnya wacana partai lokal seiring dengan ditanda tangkannya MOU Helsinki antara pemerintah RI dengan GAM, kiranya patut di pertimbangkan demi mengakhiri 'kemandulan' partai politik saat ini. Keinginan mendirikan partai lokal saat ini bukanlah sesuatu yang bersifat ahistoris. Kehadiran partai politik lokal di Indonesia pernah diakomodir dalam Pemilihan Umum 1955, itu artinya bahwa secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat.

Ahli Indonesia legendaris Prof Herbert Feith mencatat dengan baik Pemilu 1955 itu Feith membagi empat kelompok yang mengikuti pemilu tersebut, yakni partai besar, partai

---

<sup>7</sup> Kompas edisi 7 Mei 2005 "*Ketika Egoisme Mengalahkan Rasionalitas*"

menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir ini, menurut Feith, bisa dikategorikan partai atau kelompok yang bersifat kedaerahan atau kesukuan.<sup>8</sup> Masuk dalam kelompok terakhir ini terbanyak berlokasi di Jawa Barat, yakni Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia (PTI), dan Gerakan Banteng. Ada Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, ada Persatuan Indonesia Raya (PIR) NTB. Ada satu lagi kelompok partai Islam, AKUI—yang tidak diketahui kepanjangannya—di Jawa Timur. Calon-calon dari AKUI khususnya berasal dari suku Madura, yang dari sisi pandangan politiknya dekat dengan Masyumi.<sup>9</sup>

Keberadaan parta lokal sebagai alternatif kemandulan parpol nasional setidaknya karena beberapa alasan. *Pertama*, masyarakat Indonesia yang plural dan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berfungsi sebagai institusi yang mewakili wilayah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, tidak cukup memadai. Lebih-lebih dewasa ini peran dan fungsinya masih dimandulkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah harus diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki. Tidak seperti praktik

---

<sup>8</sup> Sadli Isra. “Partai politik lokal” Tempo 22 Juli 2005.

<sup>9</sup> Subur Tjahyono. “Partai Politik Lokal, Romantisme Pemilu 1955”. Tempo Interaktif 17 Juli 2005

yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elite partai di Jakarta. *Ketiga*, tidak kalah penting, kehadiran partai lokal dapat mendorong proses demokratisasi internal partai politik.<sup>10</sup>

Secara histories dan secara politik keberadaan partai lokal menjadi suatu yang tak dapat dihindari sebagai konsekwensi logis proses demokratisasi. Lalu bagaimana partai lokal jika ditinjau dari segi hukum tata Negara?.

Kalau dibaca dengan cermat UUD 1945, Pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>11</sup> Adapun salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik. Dengan demikian bahwa Pasal 28 UUD 1945 tidak menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal di Indonesia, yang menjadi perdebatan kemudian adalah ketentuan tentang kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang. Menyangkut Partai politik Indonesia memiliki UU Nomor 31/2002 tentang Partai Politik dimana pendirian sebuah partai politik harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana disinggung dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “*Akta notaries sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan tingkat nasional*”, dan ayat 3 huruf c yang berbunyi “*mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% 9lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% 9dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan*”.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> J.Kristiadi. “Takut dengan partai lokal?”. Kompas. Edisi 19 Juli 2005.

<sup>11</sup> UUD 1945 hasil amandemen ke 4. (Jakarta;Eska media.2004).

<sup>12</sup> UU Nomor 31 Tahun 2002.

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31/2000 menyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Sekiranya persyaratan kehadiran partai politik hanya sebatas ketentuan itu, dapat dipastikan tidak sulit membentuk partai politik lokal. Kesulitan membentuk partai politik lokal muncul karena akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disertai susunan kepengurusan tingkat nasional. Kesulitan makin terasa karena partai politik harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan memenuhi salah satu syarat, yaitu mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah provinsi, 50 persen dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dengan adanya syarat partai politik mempunyai susunan kepengurusan tingkat nasional dan kepengurusan tingkat provinsi (sekurang-kurangnya setengah dari jumlah provinsi yang ada), kehadiran partai politik lokal menjadi hampir tidak mungkin direalisasi. Apalagi kalau mau mengikuti pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif hanya memperkenankan partai politik mengikuti pemilihan umum kalau memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di dua pertiga dari jumlah provinsi dan pengurus lengkap sekurang-kurangnya di dua pertiga dari jumlah kabupaten/kota yang ada.

Barangkali menarik mengambil contoh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 21/2001 menentukan bahwa penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Meski tidak secara eksplisit, ketentuan itu sering dimaknai sebagai ruang membentuk partai politik lokal. Namun, semangat "partai politik lokal" itu memudar dengan ketentuan dalam ayat 2, yang menegaskan bahwa tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan



perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengecilnya ruang munculnya partai politik lokal sengaja didesain oleh mayoritas kekuatan politik di tingkat pusat. Padahal, untuk melakukan desentralisasi politik, kehadiran partai politik lokal merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, dengan pola partai politik (yang serba terpusat) selama ini, aspirasi politik di tingkat lokal cenderung dinegasikan oleh sebagian besar partai politik yang ada.

### **C. Penutup.**

Munculnya wacana partai lokal di Indonesia merupakan Sesutu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ibarat matahari terbit dari timur, sesuatu yang secara alamiah akan dan harus terjadi karena hal itu merupakan bagian dari proses demokratisasi di Indonesia, selain itu kehadiran partai lokal diharapkan akan mengakhiri kemandulan partai-partai nasional. UUD 1945 secara eksplisit telah mengamanatkan pembentukan partai lokal dalam pasal 28, meskipun kemudian harus terbentur oleh UU Nomor 31 Tahun 2002. Amandemen terhadap UU Nomor 31 Tahun 2002 serta UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum kiranya perlu ditindak lanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo. Miriam. 2002. *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*. Jakarta;Gramedia. cet.22.
- Fukuyama. Francis .2003 *“The End of History and The Last Man”* , Kemengan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Alih bahasa: Amrullah. Jakarta; Qolam. cet.3
- Isra. Sadli *“Partai politik lokal”* Tempo 22 Juli 2005
- Kristiadi. J. *“Takut dengan partai lokal?”*. Kompas. Edisi 19 Juli 2005.
- Prodjodikoro.Wirjono. 1981 *“Asas-asas Ilmu Negara dan Politik”*. Bandung; Eresco.
- Raga Maran. Rafael .2001. *“Pengantar Sosiologi Politik”* Jakarta; Rineka Cipta. Cet.1.
- Tjahyono. Subur. *“Partai Politik Lokal, Romantisme Pemilu 1955”*. Tempo Interaktif 17 Juli 2005
- UUD 1945 hasil amandemen ke 4. (Jakarta;Eska media.2004).
- Kompas edisi 7 Mei 2005 *“Ketika Egoisme Mengalahkan Rasionalitas”*
- UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

